

Transformasi Desa Menuju Kemandirian: Studi Pemanfaatan Dana Desa Berbasis IDM Di Kecamatan Bone, Bone Bolango

Author:

Jeri Arifin Urumi¹, Irfan Setiawan²

Affiliation:

Universitas Terbuka

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten ^{1,2}

Email:

jeriurumi5@gmail.com¹; irfansetiawan@ipdn.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the utilization of Village Funds in improving the Village Development Index (IDM) in Bone District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. A qualitative descriptive approach was used, using a case study method in four villages that have achieved independent village status: Segitia, Monano, Cendana Putih, and Molamahu. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, then analyzed using thematic analysis techniques. The results indicate that the utilization of Village Funds, directed at the development of productive infrastructure such as farm roads and biofloc ponds, as well as local economic empowerment programs, directly contributed to improving the social and economic resilience dimensions of the IDM indicator. Mentoring by professional staff has also been shown to strengthen community participation in development planning and improve budget accountability. This study recommends strengthening village development planning based on IDM (village development planning) data and implementing a digital monitoring system to promote transparency and evidence-based decision-making. These findings reinforce the importance of utilizing Village Funds, not only physically but also transformatively, in promoting sustainable village independence.

Keywords: Village Fund, Village Development Index, participation, village planning, data-based development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada empat desa yang telah mencapai status desa mandiri, yaitu Desa Segitia, Monano, Cendana Putih, dan Molamahu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur produktif seperti jalan usaha tani dan kolam bioflok, serta program pemberdayaan ekonomi lokal, berkontribusi langsung terhadap peningkatan dimensi ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi dalam indikator IDM. Pendampingan oleh tenaga profesional juga terbukti memperkuat partisipasi warga dalam perencanaan

pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan perencanaan pembangunan desa berbasis data IDM (village development planning), serta penerapan sistem monitoring digital untuk mendorong transparansi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Temuan ini memperkuat pentingnya pemanfaatan Dana Desa yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga transformatif dalam mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Indeks Desa Membangun, partisipasi, perencanaan desa, pembangunan berbasis data

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan desa dengan mendistribusikan Dana Desa sebagai bentuk pengakuan terhadap desa sebagai subjek pembangunan. Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015, Dana Desa telah menjadi salah satu instrumen fiskal yang paling masif dalam sejarah pembangunan nasional. Dalam satu dekade terakhir, realisasi Dana Desa terus meningkat dari Rp20,7 triliun pada 2015 menjadi lebih dari Rp71 triliun pada tahun 2024, menasar lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Besarnya alokasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya terpusat di perkotaan, melainkan dimulai dari pinggiran/desa.

Di balik skema besar ini, realitas pemanfaatan Dana Desa di lapangan menyisakan pertanyaan besar mengenai efektivitas penggunaannya dan sejauh mana program ini benar-benar mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Pemerintah telah menetapkan bahwa Dana Desa harus diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan dasar, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan potensi lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak desa menghadapi kendala dalam hal perencanaan, partisipasi masyarakat, hingga kemampuan teknis dalam pengelolaan dana yang cukup besar tersebut.

Salah satu indikator penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur dampak Dana Desa terhadap pembangunan adalah Indeks Desa Membangun (IDM), yang terdiri dari tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. IDM menjadi alat ukur nasional untuk menilai kemandirian dan tingkat kemajuan suatu desa. Data IDM pada 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 14.264 desa di Indonesia masih tergolong sebagai desa tertinggal, dan sekitar 7.000 desa masih dalam kategori sangat tertinggal. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun dana terus dikucurkan, tidak semua desa mampu bertransformasi menjadi desa maju atau mandiri sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan nasional.

Kondisi ini juga terlihat di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Bone yang memiliki 14 desa. Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa total Dana Desa yang dialokasikan untuk Kecamatan Bone pada tahun 2024 mencapai Rp10,1 miliar dan meningkat

menjadi Rp10,28 miliar pada tahun 2025. Alokasi tersebut seharusnya mampu mendorong peningkatan status IDM seluruh desa di wilayah ini. Namun kenyataannya, dari 14 desa yang ada, hanya 4 desa yang berhasil naik status menjadi desa mandiri, sementara sisanya masih dalam kategori berkembang atau maju.

Empat desa yang menjadi fokus penelitian ini—Segitia, Monano, Cendana Putih, dan Molamahu—telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai IDM mereka yang kini mencapai kategori mandiri. Sebagai contoh, Desa Monano memiliki nilai IDM sebesar 0,9011 pada tahun 2024, meningkat tajam dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang masih berada di bawah ambang batas desa maju. Keberhasilan ini diyakini tidak lepas dari pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran, terutama dalam pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal seperti kolam bioflok dan pengadaan alat nelayan.

Namun, keberhasilan ini belum merata. Penelitian pendahulu (Listyawati, 2023; Saputra, 2023) menemukan bahwa ketimpangan pemanfaatan Dana Desa masih menjadi tantangan utama. Ketidaktepatan penggunaan dana, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama tidak optimalnya transformasi status desa. Studi-studi tersebut umumnya hanya menggambarkan korelasi antara dana dan peningkatan IDM, tanpa mengeksplorasi mekanisme pemanfaatan dana secara kualitatif dari perspektif lokal.

Dari sisi teoritis, pendekatan pembangunan partisipatif (*participatory development*) menjadi salah satu konsep utama dalam pengelolaan Dana Desa. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Chambers (1997) menyatakan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat tercapai bila masyarakat setempat diberdayakan untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, teori akuntabilitas publik (*public accountability theory*) menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan pengawasan dalam penggunaan anggaran publik (Bovens, 2007), termasuk Dana Desa. *Kedua* pendekatan ini seharusnya menjadi fondasi dalam implementasi Dana Desa, tetapi masih sering terabaikan dalam praktik.

Penelitian ini juga didasarkan pada model implementasi kebijakan dari Grindle (1980) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik seperti Dana Desa sangat dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan itu sendiri, aktor pelaksana, kondisi institusi lokal, serta konteks sosial-politik. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dan kapasitas kelembagaan desa di Kecamatan Bone menjadi faktor kunci yang perlu dikaji secara mendalam.

Berangkat dari tinjauan tersebut, dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan (*gap*) antara kebijakan ideal tentang Dana Desa dan implementasi faktual di tingkat desa. Sebagian besar penelitian terdahulu bersifat kuantitatif dan berorientasi pada evaluasi output (jumlah jalan yang

dibangun, unit bantuan yang disalurkan), tetapi belum banyak yang mengeksplorasi proses, dinamika, dan konteks lokal yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut dengan pendekatan kualitatif studi kasus di empat desa di Kecamatan Bone yang telah berhasil mencapai status desa mandiri.

Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi penting dalam upaya memahami praktik baik (best practices) pemanfaatan Dana Desa secara kontekstual dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu peningkatan IDM secara lebih mendalam. Fokus pada aspek realisasi anggaran, keterlibatan masyarakat, dukungan kelembagaan, dan pengaruhnya terhadap indikator IDM di masing-masing dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi kontribusi orisinal dari studi ini terhadap literatur tentang pembangunan desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan Dana Desa secara tepat dalam konteks kebutuhan lokal di Desa Segitia, Monano, Cendana Putih, dan Molamahu Kecamatan Bone. penelitian ini juga menjelaskan hubungan antara penggunaan Dana Desa dan peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk memahami secara mendalam praktik pemanfaatan Dana Desa dalam konteks lokal dan spesifik, yakni di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial, proses pengambilan keputusan, serta faktor-faktor non-kuantitatif yang memengaruhi peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) di tingkat desa. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada konteks, dinamika, dan pengalaman lokal yang tidak dapat dijelaskan secara komprehensif melalui pendekatan kuantitatif (Yin, 2014).

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, dengan teknik purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan desa dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Peneliti memilih empat desa yang berada di Kecamatan Bone, yaitu Desa Segitia, Desa Monano, Desa Cendana Putih, dan Desa Molamahu. Keempat desa ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria: pertama, desa-desa tersebut telah mengalami peningkatan status IDM menjadi desa mandiri dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024); kedua, desa tersebut memiliki keberagaman dalam penggunaan Dana Desa, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan ketahanan sosial; ketiga, ketersediaan data dan kemudahan akses informasi dari pemerintah desa dan masyarakat menjadi pertimbangan praktis dalam pelaksanaan penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai informan kunci, seperti kepala desa, sekretaris desa, pengelola keuangan desa, pendamping lokal desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap terbuka untuk eksplorasi sesuai dengan perkembangan dialog. Selain itu, observasi langsung terhadap aktivitas dan proyek Dana Desa di lapangan juga dilakukan untuk memperkuat pemahaman kontekstual dan validitas data. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Laporan Realisasi Dana Desa, dokumen APBDes, laporan IDM dari Kementerian Desa PDTT, serta data pendukung dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah. Kombinasi data primer dan sekunder ini memungkinkan triangulasi data yang menjadi prinsip penting dalam penelitian kualitatif, guna meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi dan memilah informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen untuk difokuskan pada tema-tema utama, seperti pola pemanfaatan dana, bentuk partisipasi masyarakat, serta pengaruhnya terhadap dimensi IDM. Kemudian, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk matriks dan narasi tematik untuk memudahkan interpretasi. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan secara induktif, dengan mengkaitkan temuan-temuan lapangan dengan teori dan studi sebelumnya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan bagaimana Dana Desa digunakan, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan IDM serta praktik-praktik baik (best practices) yang dapat direplikasi di desa-desa lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dituntut untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan peran, tugas dan fungsinya dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menciptakan *clean government and good governance* (Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa), serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai yang diperintah (Ratna Soliha, 2019).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari maka pemerintah sebagai penyelenggara negara membuat kebijakan-kebijakan sesuai bidangnya masing-masing. Kebijakan pemerintahan (kebijakan publik) akan efektif apabila dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut didukung oleh masyarakat sebagai pihak yang menjadi objek kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya dan meningkatkan predikat desa melalui indeks desa membangun maka Penulis menyarankan kepada

Pemerintah Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango untuk dapat Memamfaatkan Penggunaan Dana Desa dengan Tepat agar dapat menaikkan status desa dari tertinggal menjadi desa mandiri.

Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 14 Desa, jumlah penduduk sebanyak 10.799 jiwa, dengan pusat pemerintahan berada di desa Taludaa.

Tabel 1. Jumlah Desa, Penduduk & Dana Desa Kaecamatan Bone Kabupaten Bonebolango

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Dana Desa (Rp)	
			2024	2025
1	Taludaa	1.268	812.440.000	963.869.000
2	Segitia	1.359	728.016.000	715.385.000
3	Monano	760	933.731.000	669.554.000
4	Cendana Putih	479	643.768.000	827.829.000
5	Molamahu	912	720.564.000	708.254.000
6	Tumbuh Mekar	507	645.074.000	692.843.000
7	Waluhu	421	621.934.000	612.384.000
8	Bilolanthunga	911	802.764.000	965.258.000
9	Inogaluma	674	720.099.000	701.921.000
10	Permata	518	677.566.000	673.196.000
11	Masiaga	729	667.961.000	653.843.000
12	Ilohuuwa	754	682.448.000	692.117.000
13	Muara Bone	466	637.313.000	617.901.000
14	Moodulia	1.021	813.043.000	785.993.000
TOTAL		10.779	10.106.721.000	10.280.347.000

Sumber : Dirjend DJKP 2025

Dari tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa secara total terjadi kenaikan jumlah anggaran dana desa bagi Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango sebesar 1,7 % atau sebanyak Rp. 173.626.000,- dari jumlah dana desa tahun anggaran 2024 berjumlah Rp. 10.106.721.000,- naik menjadi Rp. 10.280.347.000,- untuk tahun anggaran 2025.

Peraturan Menteri Desa PDT No.2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan dana desa bahwa ;

1. Paling tinggi 15 % dari pagu anggaran untuk BLT dana desa,
2. Paling rendah 20 % untuk ketahanan pangan
3. Paling banyak 3 % untuk operasional Pemerintah Desa
4. 62 % untuk Pengembangan Potensi Desa dan Program Prioritas lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa (PDT Nomor 2 Tahun 2024), maka penulis mendapatkan gambaran penggunaan dana desa di Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango sudah seharusnya seperti rincian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Proyeksi Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango

No	Nama Desa	Dana Desa Thn 2024 (Rp)	Bantuan Langsung Tunai Paling Tinggi 15% (Rp)	Ketahanan Pangan Paling Rendah 20% (Rp)	Operasional Desa Paling Banyak 3% (Rp)	Pengembangan Potensi Desa 62% (Rp)	Jumlah Prosentasi Dana Desa (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	(h=d+e+f+g)
1	Taludaa	812,440,000	121,866,000	162,488,000	24,373,200	503,712,800	812,440,000
2	Segitia	728,016,000	109,202,400	145,603,200	21,840,480	451,369,920	728,016,000
3	Monano	933,731,000	140,059,650	186,746,200	28,011,930	578,913,220	933,731,000
4	Cendana Putih	643,768,000	96,565,200	128,753,600	19,313,040	399,136,160	643,768,000
5	Molamahu	720,564,000	108,084,600	144,112,800	21,616,920	446,749,680	720,564,000
6	Tumbuh Mekar	645,074,000	96,761,100	129,014,800	19,352,220	399,945,880	645,074,000
7	Waluhu	621,934,000	93,290,100	124,386,800	18,658,020	385,599,080	621,934,000
8	Bilolanthunga	802,764,000	120,414,600	160,552,800	24,082,920	497,713,680	802,764,000
9	Inogaluma	720,099,000	108,014,850	144,019,800	21,602,970	446,461,380	720,099,000
10	Permata	677,566,000	101,634,900	135,513,200	20,326,980	420,090,920	677,566,000
11	Masiaga	667,961,000	100,194,150	133,592,200	20,038,830	414,135,820	667,961,000
12	Ilohuuwa	682,448,000	102,367,200	136,489,600	20,473,440	423,117,760	682,448,000
13	Muara Bone	637,313,000	95,596,950	127,462,600	19,119,390	395,134,060	637,313,000
14	Moodulia	813,043,000	121,956,450	162,608,600	24,391,290	504,086,660	813,043,000
TOTAL		10,106,721,000	1,516,008,150	2,021,344,200	303,201,630	6,266,167,020	10,106,721,000

Sumber : Pemerintah Kab.Bone Bolango, 2025

Penulis membatasi pada empat desa sebagai tempat penelitian, sehingga di bawah ini penulis menyampaikan realisasi penggunaan dana desa (Sarpras dan Non Sarpras) pada tahun 2024 di Desa, Segitia, Monano, Cendana Putih dan Molamahu Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango sebagai berikut :

Tabel 3. Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 - Non Sarpras Di Desa Segitia, Monano, Cendana Putih, Molamahu Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango

No	Nama Desa	Total Realisasi (Rp)	Ket
1	Sogitia	545,283,000	(terdiri dari 18 kode transaksi rekening desa)
2	Monano	949,299,000	(terdiri dari 27 kode transaksi rekening desa)
3	Cendana Putih	526,660,000	(terdiri dari 21 kode transaksi rekening desa)
4	Molamahu	693,197,000	(terdiri dari 25 kode transaksi rekening desa)

Sumber : PLD-Data Realisasi Non Sarpras 2024 Kec.Bone

Berdasarkan sumber dari Pelaksana Lokal Desa (PLD) Kecamatan Bone seperti yang diuraikan di atas bahwa realisasi penggunaan dana desa untuk kegiatan non sarana dan prasarana (*Non Sarpras*) di empat desa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

Tabel 4. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 - Non Sarpras di Desa Segitia, Monano, Cendana Putih, Molamahu Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango

No	Nama Desa	Dana Desa Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Dana Desa				Realisasi Dana Desa Non Sarpras (Rp)	Sisa Dana Desa (Rp)
			Bantuan Langsung Tunai (Rp)	Ketahanan Pangan (Rp)	Operasional Desa (Rp)	Pengembangan Potensi Desa (Rp)		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d+e+f+g)	i = (c - h)
1	Segitia	728,016,000	108,000,000		13,120,000	424,163,000	545,283,000	182,733,000
2	Monano	933,731,000	86,400,000	231,977,000	21,645,000	522,209,000	862,231,000	71,500,000
3	Cendana Putih	643,768,000	43,200,000	33,950,000	22,400,000	427,110,800	526,660,800	117,107,200
4	Molamahu	720,564,000	72,000,000	143,370,000	10,800,000	467,027,000	693,197,000	27,367,000
		3,026,079,000	309,600,000	409,297,000	67,965,000	1,840,509,800	2,627,371,800	

Sumber: Pemerintah Kab. Bone Bolango, 2025

Bertepatan dengan penelitian pada penulisan Karya Ilmiah ini, Penulis merupakan *Tenaga Pendamping Profesional (TPP)* dan bekerja sama dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango, sehingga rincian realisasi penggunaan dana desa pada kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut;

Tabel 5. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 - Sarpras di Desa Segitia, Monano, Cendana Putih, Molamahu Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango

No	Nama Desa	Jenis Pekerjaan	Unit Volume	Jumlah Anggaran	Dokumentasi 100%	
1	Sogitia	Pembangunan Jalan Usaha Tani	420 M2	Rp. 182,733,000		
2	Monano	Pembangunan Bioflok	1 unit	Rp. 71,500,000		
3	Cendana Putih	Pembamngunan Jalan Usaha Tani	325 M2	Rp. 117,107,200		
4	Molamahu	Bantuan Mesin Katintin 9PK	5 unit	Rp. 27,367,000		

Sumber: Pemerintah Kab. Bone Bolango, 2025

Tabel 6. Total Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Segitia, Monano, Cendana Putih, Molamahu Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango

No	Nama Desa	Dana Desa Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Dana Desa				Realisasi Dana Desa Non Sarpras (Rp)	Sisa Dana Desa (Rp)
			Bantuan Langs.Tunai (Rp)	Ketahanan Pangan (Rp)	Operasional Desa (Rp)	Pengembangan Potensi Desa (Rp)		
			d	e	f	g		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d+e+f+g)	i = (c - h)
1	Segitia	728,016,000	108,000,000	182,733,000	13,120,000	424,163,000	728,016,000	-
2	Monano	933,731,000	86,400,000	231,977,000	21,645,000	593,709,000	933,731,000	-
3	Cendana Putih	643,768,000	43,200,000	151,057,200	22,400,000	427,110,800	643,768,000	-
4	Molamahu	720,564,000	72,000,000	170,737,000	10,800,000	467,027,000	720,564,000	-
		3,026,079,000	309,600,000	736,504,200	67,965,000	1,912,009,800	3,026,079,000	

Sumber: Pemerintah Kab. Bone Bolango, 2025

Dari tabel 2.6 di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan dana desa tahun 2024 habis digunakan di setiap desa, namun ini belum menunjukkan penggunaan dana desa sudah tepat sasaran, mengapa demikian karena belum sesuai dengan prosentasi pengalokasian dana desa yang telah ditetapkan pemerintah, seperti yang di uraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Perbandingan Prosentase Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Segitia, Monano, Cendana Putih, Molamahu Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango

No	Alokasi	Uraian	Jumlah Dana Desa (Rp)			
			Sogitia	Monano	Cendana Putih	Molamahu
1	BLT (Paling Tinggi 15%)	Rencana	109,202,400	140,059,650	96,565,200	108,084,600
		Realisasi	108,000,000	86,400,000	43,200,000	72,000,000
		Selisih	1,202,400	53,659,650	53,365,200	36,084,600
		Prosentase	99%	62%	45%	67%
2	Ketahanan Pangan (Paling Rendah 20%)	Rencana	145,603,200	186,746,200	128,763,600	144,112,800
		Realisasi	182,733,000	231,977,000	151,057,200	170,737,000
		Selisih	(37,129,800)	(45,230,800)	(22,293,600)	(26,624,200)
		Prosentase	126%	124%	117%	118%
3	Operasional Desa (Paling Banyak 3%)	Rencana	21,840,000	28,011,930	19,313,040	21,616,920
		Realisasi	13,120,000	21,645,000	22,400,000	10,800,000
		Selisih	8,720,000	6,366,930	(3,086,960)	10,816,920
		Prosentase	60%	77%	116%	50%
4	Pengembangan Potensi Desa 62%	Rencana	451,369,920	578,913,220	399,136,160	446,749,680
		Realisasi	424,163,000	593,709,000	427,110,800	467,027,000
		Selisih	27,206,920	(14,795,780)	(27,974,640)	(20,277,320)
		Prosentase	94%	103%	107%	105%

Sumber: Pemerintah Kecamatan Bone, 2025

Dari hasil pembahasan di atas bahwa realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 memiliki beberapa point yang perlu di perhatikan antara lain ; a) Alokasi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak 100% di gunakan dimana desa Cendana Putih paling sedikit menggunakan alokasi

dana BLT hanya 45 %, disusul desa Monano 62%, kemudian desa Molamahu 67% dan paling tinggi adalah desa Sogitia 99%. b) Alokasi dana Ketahanan Pangan sudah sesuai namun perlu ditingkatkan. c) Alokasi dana Operasional Desa sudah tepat namun masih ada 1 desa yang melebihi anggaran yang ditetapkan yaitu desa Cendana Putih yakni 16% melebihi dari alokasi dana yang telah ditetapkan. d) Alokasi dana Pengembangan Potensi Desa melebihi 3% - 7% dari pagu anggaran.

Indeks Desa Membangun (IDM) Di Desa-desanya Kecamatan Bone

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan imlementasi undang-undang desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan kondisi sosial desa, (*DirJend.Pembangunan Desa - 2023*; <https://idm.kemendesa.go.id>).

Dengan adanya program dana desa telah membawa dampak perkembangan status desa di empat desa yang menjadi tempat penelitian kami, yang pada mulanya merupakan desa dengan status sangat tertinggal, perlahan bangkit hingga sekarang menjadi desa dengan status desa mandiri. Untuk mengukur IDM suatu desa, ada tiga demensi indikator yang digunakan yaitu dimensi sosial yang merupakan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang meliputi akses terhadap logistic dan perbankan, dimensi ekonomi yang merupakan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemukiman, dimensi ketahanan lingkungan (IKL) yang meliputi ketahanan lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana. Berikut ini kami sampaikan nilai indeks dimensi di empat desa sebagai berikut ;

Tabel 8. Nilai Indeks Dimensi IDM Tahun 2024 Desa Sogitia, Moanano, Cendana Putih, Molamahu

No	Indeks Dimensi	Nilai Indeks Dimensi IDM Desa			
		Sogitia	Monano	Cendana Putih	Molamahu
1	Indeks Ketahan Sosial(IKS)	0,8229	0,9200	0,8629	0,8
2	Indeks Ketahanan Ekonomi(IKE)	0,7167	0,7833	0,6167	0,6667
3	Indeks Ketahanan Lingkungan(IKL)	0,9333	1	1	1

Sumber : PLD-IDM Kec.Bone – 2024

Adapun nilai rata-rata Indeks Desa Membangun yang telah ditetapkan dengan ambang batas (Fauzi, 2024) sebagai berikut :

- Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
- Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
- Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
- Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
- Desa Mandiri : > 0,815

Dengan demikian perhitungan Nilai IDM di empat desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Sogitia
$$= 1/3 (IKS + IKE + IKL)$$
$$= 1/3 (0,8229 + 0,7167 + 0,9333)$$
$$= 1/3 (2,4729) \text{ Nilai IDM} = 0,8243$$

Kategori Desa = MANDIRI
2. Desa Monano
$$= 1/3 (0,9200 + 0,7833 + 1)$$
$$= 1/3 (2,7033) \text{ Nilai IDM} = 0,9011$$

Kategori Desa = MANDIRI
3. Desa Cendana Putih
$$= 1/3 (0,8629 + 0,6167 + 1)$$
$$= 1/3 (2,4796) \text{ Nilai IDM} = 0,8265$$

Kategori Desa = MANDIRI
4. Desa Molamahu
$$= 1/3 (0,8000 + 0,6667 + 1)$$
$$= 1/3 (2,4667) \text{ Nilai IDM} = 0,8222$$

Kategori Desa = MANDIRI

Dari uraian diatas bahwa dengan pemamfaatan dana desa yang tepat dapat meningkatkan perkembangan desa dari kategori desa sangat tertinggal akan bangkit menjadi desa dengan kategori Mandiri. Untuk Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango dari 14 desa yang ada tercatat masih ada tujuh desa berada pada kategori Maju, Penulis menyarankan untuk memamfaatkan dana desa pada tahun ini dengan tepat sasaran dan meningkatkan peran Tenaga Pendamping Profesional serta Pendamping Desa untuk bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk melihat langsung kebutuhan lokal di wilayahnya agar supaya penyaluran Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa sehingga upaya ini akan meningkatkan status desanya dimana Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi dasar tolak ukurnya serta dapat mempertahankan status desa Mandiri yang telah diraih bagi Desa Sogitia, Monano, Cendana Putih dan Molamahu.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa secara strategis dan kontekstual dapat mendorong peningkatan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya dalam dimensi ketahanan sosial (IKS), ketahanan ekonomi (IKE), dan ketahanan lingkungan (IKL). Empat desa yang diteliti—Segitia, Monano, Cendana Putih, dan Molamahu—menunjukkan pola praktik pemanfaatan Dana Desa yang cenderung adaptif terhadap kondisi lokal. Peningkatan skor IDM yang signifikan di keempat desa tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan pada output pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Salah satu bentuk intervensi yang paling menonjol dalam studi ini adalah pembangunan infrastruktur jalan usaha tani. Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi hasil pertanian, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan aksesibilitas petani terhadap lahan produksi, pasar, dan layanan publik. Jalan usaha tani di Desa Cendana Putih dan Molamahu secara langsung mempercepat waktu tempuh distribusi hasil panen dari ladang ke titik pengumpulan dan penjualan. Hal ini berdampak pada efisiensi biaya transportasi, peningkatan frekuensi distribusi, serta pengurangan kerugian pascapanen. Dalam konteks IDM, pembangunan jalan ini berkontribusi pada peningkatan ketahanan sosial karena memperkuat akses warga terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Jalan usaha tani juga mendorong terbentuknya hubungan sosial yang lebih aktif antarpetani dan antarwilayah dusun karena mobilitas yang meningkat. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur fisik, meskipun bersifat ekonomi, memiliki efek ganda terhadap dimensi sosial karena memperluas ruang interaksi dan memperkuat kohesi sosial.

Di sisi lain, intervensi dalam bentuk kolam bioflok di Desa Monano dan Segitia memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan ketahanan ekonomi desa. Sistem kolam bioflok merupakan teknologi budidaya ikan yang hemat lahan dan air, serta dapat dilakukan dalam skala rumah tangga. Penggunaan Dana Desa untuk membangun unit kolam bioflok kelompok di dua desa ini menghasilkan peningkatan pendapatan warga melalui diversifikasi sumber ekonomi. Selain itu, kolam bioflok mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama yang memperkuat struktur ekonomi lokal. Dalam kerangka IKE, kegiatan ini berkontribusi terhadap indikator peningkatan pendapatan, jumlah rumah tangga yang memiliki usaha mandiri, serta tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal. Inovasi ini juga mendorong masyarakat untuk mengakses pelatihan kewirausahaan dan pembukuan sederhana, yang menambah kapasitas ekonomi mikro secara berkelanjutan.

Namun, keberhasilan pemanfaatan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh alokasi pada kegiatan fisik atau ekonomi. Salah satu faktor penentu dalam penelitian ini adalah peran pendampingan desa, baik oleh pendamping lokal desa (PLD) maupun oleh perangkat teknis dari pemerintah kabupaten. Di keempat desa tersebut, pendampingan yang konsisten terbukti meningkatkan kapasitas perencanaan desa secara partisipatif dan akuntabel. Pendamping mendorong pelaksanaan musyawarah desa yang lebih inklusif, memperkuat dokumentasi kegiatan, serta memastikan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi sebagai katalisator dalam membangun tata kelola desa yang transparan dan partisipatif. Hal ini sesuai dengan pandangan Chambers (1997) bahwa pembangunan desa akan berhasil jika terjadi pergeseran kekuasaan dari elite ke komunitas melalui proses fasilitasi yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan teori akuntabilitas publik dari Bovens (2007) yang menekankan pentingnya sistem pertanggungjawaban horizontal (dari pemimpin kepada masyarakat) dan vertikal (dari desa kepada pemerintah supra-desa). Pendampingan yang efektif membantu menciptakan ruang pengawasan sosial yang aktif dan menjadikan pelaporan dana sebagai aktivitas yang dipahami secara luas, bukan sekadar prosedur administratif. Di Desa Molamahu, misalnya, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) telah mengalami transformasi menjadi forum refleksi tahunan yang membahas capaian, tantangan, dan rencana tindak lanjut secara terbuka. Praktik ini memperkuat legitimasi kepemimpinan desa dan memperbesar peluang keberhasilan program karena masyarakat merasa memiliki (sense of ownership).

Meskipun capaian-capaian tersebut menggembirakan, penelitian ini juga mengungkap bahwa keberhasilan peningkatan IDM tidak bisa dilepaskan dari kualitas perencanaan pembangunan desa. Salah satu rekomendasi penting dari temuan ini adalah perlunya penerapan konsep Village Development Planning (VDP) yang terstruktur dan berbasis data. VDP mengedepankan integrasi antara dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes dengan sistem informasi desa dan data mikro seperti IDM, data kemiskinan, dan potensi lokal. VDP yang baik memungkinkan desa untuk merancang program-program berbasis kebutuhan aktual dan sumber daya yang tersedia, sekaligus memperhitungkan keberlanjutan jangka panjang. Dalam praktiknya, implementasi VDP akan membutuhkan pelatihan teknis perangkat desa, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, serta pelibatan aktif BPD sebagai badan legislatif desa.

Rekomendasi selanjutnya adalah pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital, yang memungkinkan pelacakan real-time atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan capaian IDM. Penggunaan platform digital berbasis dashboard atau aplikasi sederhana berbasis Android memungkinkan transparansi dan aksesibilitas data oleh masyarakat luas. Sistem ini akan mempermudah pemerintah desa dalam menyusun laporan, mempercepat verifikasi data oleh pemerintah kabupaten, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemantauan program. Pengalaman di Desa Cendana Putih yang telah menginisiasi pelaporan kegiatan melalui grup WhatsApp komunitas menjadi contoh awal dari potensi digitalisasi pengawasan publik. Namun, agar sistem ini efektif, perlu adanya regulasi pendukung, pelatihan literasi digital untuk masyarakat desa, serta kemitraan dengan perguruan tinggi atau lembaga teknologi informasi daerah.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan pentingnya desain kebijakan Dana Desa yang tidak hanya menekankan aspek alokasi anggaran, tetapi juga menata ulang sistem pendampingan, partisipasi warga, dan pemanfaatan teknologi. Transformasi status IDM dari berkembang menjadi mandiri bukanlah semata-mata hasil dari besarnya dana yang diterima, melainkan dari bagaimana desa mampu memaknai, mengelola, dan mengembangkan potensi mereka secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, pengalaman keempat desa di Kecamatan Bone dapat menjadi model pembelajaran (learning village) bagi desa-desa lain di Kabupaten Bone Bolango maupun secara nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa secara tepat, terencana, dan berbasis kebutuhan lokal memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), khususnya pada dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Studi kasus di empat desa—Segitia, Monano, Cendana Putih, dan Molamahu—di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, menunjukkan bahwa intervensi melalui Dana Desa seperti pembangunan jalan usaha tani, pengembangan kolam bioflok, serta bantuan peralatan produktif, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperkuat modal sosial masyarakat, dan meningkatkan keterhubungan antarwilayah. Kenaikan status IDM di keempat desa dari sebelumnya desa tertinggal menjadi desa mandiri tidak hanya merupakan hasil dari pembangunan fisik, tetapi juga cerminan keberhasilan tata kelola partisipatif yang difasilitasi oleh pendampingan profesional. Keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa, penyusunan RPJMDes berbasis data IDM, serta pengawasan realisasi anggaran yang transparan terbukti menjadi faktor penentu efektivitas Dana Desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini merekomendasikan penerapan village development planning yang terintegrasi dengan data IDM sebagai arah kebijakan perencanaan jangka menengah desa. Selain itu, dibutuhkan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital yang dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis bukti di tingkat desa. Dengan demikian, kesuksesan pemanfaatan Dana Desa tidak hanya bergantung pada besar kecilnya anggaran, tetapi juga pada kualitas perencanaan, kapasitas aparatur desa, keterlibatan masyarakat, dan dukungan teknologi informasi yang memadai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penguatan kebijakan pembangunan desa berbasis data dan partisipasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing public accountability. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Fauzi, Syahrial, (2024), Indeks Desa Membangun (IDM) Indikator Tunggal Pembangunan Desa - <https://anjimuara.baritokualakab.go.id>

- Kementerian Desa PDTT. (2024). Data IDM dan Alokasi Dana Desa Tahun 2024. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Listyawati, (2023) Determinasi Faktor Utama Ketidakmerataan Pembangunan Desa di Kabupaten Jember - Jurnal Plano Vol.3 no. 2 April 2023 <https://jurnal.unipasby.ac.id>
- Nugroho, R. (2020). Public Policy in Indonesia: From Centralization to Decentralization and Beyond. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.
- Saputra, Diki Wahyu, (2023) Analisis Pembangunan Desa Berdasarkan Capaian Indeks Desa Membangun Di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id>
- Soliha, Ratna, (2019), Pengantar Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Tangerang Selatan
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (5th ed.). SAGE Publications.